

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010), dalam pembangunan ekonomi terdapat suatu pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam skala nasional (Mulyanto, 2008).

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah hingga saat ini, tidak terlepas dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk lebih memajukan dan melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Undang-undang ini sekaligus menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka,



kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai pembangunan yang optimal.

Tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi daerah, sebab setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda baik dari sisi potensi kandungan sumber daya alam, kondisi geografis maupun potensi khas daerah lainnya. Oleh karena itu penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah, terutama bagi daerah baru, tidak dapat secara serta merta mengadopsi kebijaksanaan nasional, Provinsi maupun daerah induknya atau daerah lain yang dianggap berhasil. Untuk membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.



Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah hampir 2 juta km<sup>2</sup> memiliki potensi sumberdaya alam baik dilaut dan didarat yang sangat besar. Di laut, Indonesia memiliki 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kedaulatan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km<sup>2</sup> pada ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pengkal). Di darat, memiliki lahan kehutanan 113 juta ha, lahan sawah produktif 9,9 juta ha, lahan perkebunan produktif 15,5 juta ha, 60 cekungan prospektif sumber mineral migas.

Di Indonesia kenyataan nya sumber daya yang berlimpah tersebut tidak merata berada diseluruh daerah. Hal yang sama terjadi dengan sebaran sumber daya manusia yang merupakan “aktor” pembangunan tersebar juga tidak merata. Implikasi dari ketidak merataan keberadaan kedua sumber daya tersebut belum baik nya ditingkat pelayanan infrastruktur

wilayah melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama daerah-daerah terisolir dan tertinggal.

Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya yang berlimpah tetapi tidak merata tersebut bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan umum secara luas, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh pemerintah untuk pengelolaan wilayah yang tertinggal. Hal ini seiring dengan agenda kabinet Gotong Royong untuk menormalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumber daya setempat, dimana baik sumberdaya lautan dan daratan saat ini didorong pemanfaatannya, sebagai salah satu andalan bagi pemulihan perekonomian nasional, kemudian begitu juga dengan provinsi Sumatra Barat.

Jika disinkronkan antara kebijakan dalam PRJM buku I Tahun Anggaran 2015-2019 dengan kesepakatan di Musrenbang pada prinsipnya sama, namun masih banyak arah kebijakan di dalam hasil Rencana dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016 yang detail bentuk kebijakannya, masih menyerupai kebijakan dalam buku I RPJM Tahun Anggaran 2015-2019. Berdasarkan urutan arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kader –dayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat termasuk di pemukiman migrasi belum merupakan arah kebijakan yang lebih penting dibandingkan arah kebijakan mengenai pembangunan sarana bisnis/ pusat bisnis di perdesaan dan pengembangan komunitas teknologi pedesaan.

Sejak disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan terjadi perubahan mindset dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang lebih mendahulukan penguatan pembangunan di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini sejalan dengan

agenda prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam buku I RPJMN Tahun 2015-2019 mengenai membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Pembangunan dari pinggiran harus menjadi model pembangunan yang mampu membangun keterkaitan, keselarasan, dan kemitraan. Jika ketiga hal ini dapat terwujud maka kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/ jasa, usaha menengah dan besar serta aktivitas ekonomi modern ( RPJMN Indonesia, 2015-2019).

Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Indonesia, pembangunan perekonomian di Sumatra Barat secara makro relatif baik meskipun belum diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Sumatra Barat selama periode 2008-2013 mengalami sedikit peningkatan angka 0,29 menjadi 0,36, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antar kabupaten/kota di Sumatra Barat tergolong tinggi secara nasional sehingga kurang mendukung dalam menjaga stabilitas perekonomian wilayah (SAPW Sumatra Barat, 2015), selanjutnya bagaimana perekonomian wilayah di Kabupaten Sijunjung.



Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten ini posisinya cukup strategis yaitu terletak pada jalur yang menghubungkan 3 provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Sumatra Barat. Jalur lintas Provinsi yang di miliki Kabupaten Sijunjung menjadi sebuah potensi yang besar bagi perekonomian daerah (BPS Kabupaten Sijunjung, 2015).

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Sijunjung telah berlangsung selama 67 tahun sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 menurut Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Barat Nomor SK/9/GN/IST. Selama kurun waktu itu

telah terjadi beberapa kali perubahan wilayah administratif dan pembangunan. Pada dekade awal (1949-1960) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghadapi situasi yang cukup berat sehingga proses pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Perubahan wilayah administratif dan pembangunan berlangsung pada tahun 1990. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1990 tanggal 1 September 1990 tentang Perubahan Batas dan Luas Kotamadya Daerah tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menyebabkan sebagian wilayah Sijunjung dimasukkan ke Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto. Perubahan ini ditujukan untuk memperlancar proses pembangunan daerah (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).



Era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung mengalami perubahan yang besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan Kabupaten Sijunjung memasuki era baru. Wilayah administratif dan pembangunan Kabupaten Sijunjung secara resmi tidak lagi mencakup Kabupaten Dharmasraya. Luas daerah Kabupaten Sijunjung setelah pembentukan Kabupaten Dharmasraya menjadi 3.130,80 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 192.991 jiwa pada tahun 2005 (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Sebelum tahun 2003 seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung menyatu dengan Kabupaten Dharmasraya. Wilayah administratif Kabupaten Sijunjung pada masa itu yang demikian luas telah menyebabkan sebagian dari rencana-rencana pembangunan daerah menemui berbagai kesulitan dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan percepatan pemerataan pembangunan yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang telah terpisah dari Kabupaten Sijunjung

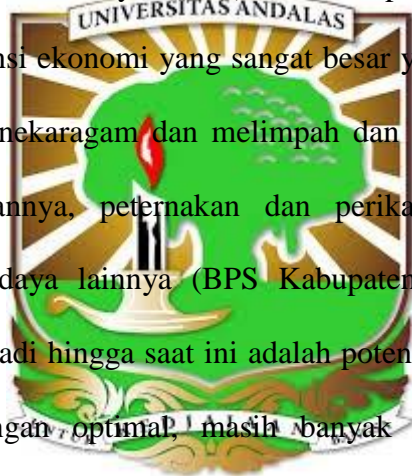


merupakan langkah konkrit untuk mempermudah penyusunan rencana pembangunan di kedua wilayah, sehingga memungkinkan terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan UU No 38 tahun 2003 telah membawa pengaruh yang cukup signifikan pada penguasaan potensi sumber daya alam bagi Kabupaten Sijunjung. Sumber daya alam merupakan modal utama penopang pembangunan ekonomi dan sistem kehidupan Sijunjung. Hingga tahun 2005, peran sumber daya alam dalam pembentukan PDRB Sijunjung mencapai 40 persen. Pemanfaatan sumber daya alam terutama berkaitan dengan sektor pertanian dan pertambangan yang merupakan sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat. (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Daerah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yaitu meliputi potensi kekayaan sumber daya alam yang beranekaragam dan melimpah dan potensi sumber daya manusia. Mulai dari potensi pertaniannya, peternakan dan perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sumber daya lainnya (BPS Kabupaten Sijunjung, 2015). meskipun demikian, fenomena yang terjadi hingga saat ini adalah potensi yang dimiliki tersebut masih belum mampu dikelola dengan optimal, masih banyak permasalahan, hambatan dan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, seperti kendala belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, sarana-prasarana perdagangan, transportasi, dan pelayanan jasa-jasa. Selain itu, setiap daerah belum menunjukkan kecenderungan adanya pengembangan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. (RTRW, 2011-2013).

Disisi lain fenomena masalah pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah juga belum mampu di atasi dengan baik oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadi ketimpangan antar daerah. meskipun Kabupaten Sijunjung mulai gencar dalam membangun



sarana dan prasarana, namun kondisi sarana dan prasarana saat ini masih menunjukkan keterbatasan baik dari kuantitas ataupun dari kualitas. Disamping itu, aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana untuk menggerakkan perekonomian masih rendah dan terbatas sehingga sarana dan prasarana yang ada saat ini belum berfungsi secara optimal sebagai elemen pendorong pembangunan ekonomi sektor riil Kabupaten Sijunjung (RTRW, 2011-2013).

Mengingat hal ini perlu dilakukan suatu pengkajian yang lebih dalam untuk keperluan perencanaan pembangunan dan bahan pertimbangan kebijakan terhadap pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Ekonomi Dalam Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sijunjung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan di analisis diantaranya:

1. Sektor-sektor ekonomi apakah yang potensial di Kabupaten Sijunjung, sehingga dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah?
2. Bagaimanakah tingkat interaksi dan tingkat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sijunjung serta kaitannya dalam penentuan lokasi strategis yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah?
3. Komoditi ekonomi apakah yang merupakan komoditi unggulan di masing-masing Kecamatan, sehingga dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

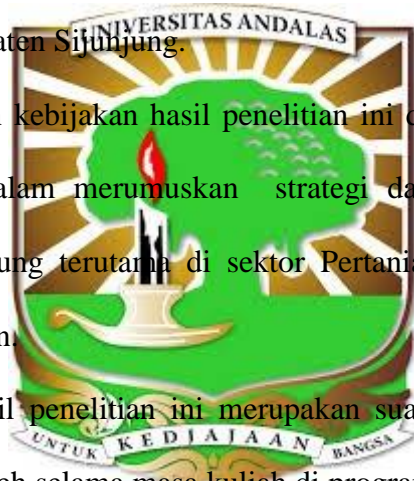
1. Menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Sijunjung yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah.



2. Menganalisis pengaruh tingkat interaksi dengan tingkat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sijunjung serta kaitannya dalam penentuan lokasi strategis yang dapat dikembangkan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah.
3. Menganalisis komoditi ekonomi unggulan di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pengambilan kebijakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan didalam merumuskan strategi pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sijunjung.
2. Bagi pengambilan kebijakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sijunjung terutama di sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan juga Pertambangan.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan suatu penerapan terhadap teoritis yang telah diperoleh selama masa kuliah di program studi ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Sebagai bahan informasi yang dapat menjadi bahan studi penelitian sejenis secara lebih mendalam dan juga sebagai perbandingan penelitian di masa yang akan datang.





## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan mengapa memilih Kabupaten Sijunjung sebagai studi kasus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulis.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan metode penelitian.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kondisi umum daerah dan perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Sijunjung serta perkembangan sektor-sektor ekonomi.

### **BAB V: TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisis data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan juga berisi pesan untuk berbagai pihak.

